

---

## URBAN ARCHITECTURE AS A TRANSFORMATION OF IDENTITY A Study Case from Pekanbaru City, Indonesia

**Yohannes Firzal**

*Departemen Arsitektur Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru  
\*Email: yfirzal@eng.unri.ac.id*

### ABSTRACT

*Identity of place can be changed and reconstructed. This is seen as capable of supporting dynamic changes in real life through the transformation of practices and the articulation of social relations. In this sense, the identity is affected by culture and cultural production, and is an unfixed, unfinished and varying process that affects both the place and society. By using a qualitative approach, this study investigates the influence of Malay culture in Pekanbaru city. The field data are grouped, analysed, and interpreted within an iterative process to expand understanding of the processes of reconstructing identity, and how the identity on the margins becomes an exclusive set of collective identities. Thus, this paper shows connections between the culture and identity of place which is identified through architecture and socio-cultural change in urban society.*

**Keywords:** *Identity, Urban Architecture, Socio-Cultural Change.*

### PENDAHULUAN

Identitas suatu tempat akan selalu menjadi topik bahasan menarik dalam bidang arsitektur dan arsitektur perkotaan. Untuk memahami hal ini, perlu kiranya mengenal terlebih dahulu konsep dasar identitas. Dalam hal ini, terdapat dua konsep dasar yaitu: konsep jati diri (existing or being concept), dan konsep proses (*becoming concept*).

Konsep jati diri menjelaskan bahwa identitas tidak dapat dirumuskan dari suatu konsep luas dan juga tidak dapat juga direpresentasikan melalui konsep yang lebih rendah (Heidegger, 1968). Namun suatu identitas bergantung pada konsepsi tempatan tertentu yang mempertimbangkan lokasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan, seperti *sense of place*; sering dijadikan sebagai acuan awal (precognitive) dengan artian yang diperluas, dan mengabaikan perkembangan sosial tempatan (Dovey, 2010). Sehingga konsep jati diri akan cenderung menuju bentuk tunggal, tetap, dan statis yang dapat diidentikan dengan bentuk ketertutupan dan menolak pengaruh luar (Massey, 1994). Secara sederhana, menurut konsep jati diri, identitas tidak dapat diubah;

menolak pengaruh luar dan nyaman dengan kondisi yang dimilikinya. Konsep dasar identitas seperti ini cukup banyak berkembang dan diterjemahluaskan seperti ide kemurnian (purity), keindahan (picturesqueness), semangat lokal (local spirit), and nilai hakiki tempatan (genius loci) (Norberg-Schulz, 1980; Jive and Larkham, 2003).

Sedangkan menurut konsep proses, identitas digambarkan sebagai sesuatu yang tidak begitu jelas, abstrak, dan dipengaruhi oleh berbagai bentuk pemikiran dan isu (Deleuze and Guattari, 2004). Dalam pengertian dasar; suatu identitas menjadi hal yang dapat dan sangat dimungkinkan untuk dibentuk kembali (Deleuze and Guattari, 2004; Ballantyne, 2007). Sehingga, suatu identitas dapat berubah atau diubah, dan kondisi ini ditentukan oleh keterkaitan dari pada esensi (De Landa, 2006). Lebih lanjut, identitas juga dapat dijelaskan sebagai suatu praktek perubahan yang terbentuk melalui keterlibatan simbolis kapital dari budaya dan produk kebudayaan (Dovey, 2010).

Dalam tulisan ini, transformasi identitas suatu tempat disintesa berdasarkan konsep proses (*becoming concept*). Dalam hal ini, identitas tempatan didefinisikan sebagai

penekanan dari hubungan sosial yang muncul melalui interaksi antara satu dengan lainnya, dan sudah tentu suatu hal yang dapat diperbaharui (Massey, 1994). Identitas dalam hal ini akan dirumuskan dalam artian lebih bebas (outward-looking), jamak (multiple), dan terbuka (open) dengan karakter yang terbentuk melalui keterkaitan dan interaksi (Dovey, 2010). Oleh karena terbentuk secara sosial, maka identitas akan menjadi sesuatu hal yang sedang berproses; dapat berubah, dibentuk, dan belum selesai (Deleuze and Guattari, 2004; Ballantyne, 2007; Dovey, 2010). Hal ini akan menggambarkan suatu bentukan proses secara terus menerus yang tidak berujung. Sehingga identitas suatu tempat seharusnya didefinisikan sebagai kegiatan pembetulan (practice) dari pada sesuatu telah ada (pregiven), menghargai arti penting proses (valorises routes) dari pada hal didapat (roots), sesuatu yang mengalir (flows) dari pada keseimbangan (stasis). Dalam pandangan ini, maka suatu tempat akan dapat mengakomodasi perbedaan dan terbuka akan kemungkinan baru yang sedang berlangsung (Dovey, 2008).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau. Dalam hal budaya, meskipun terdapat asumsi bahwa Melayu berasal dari Kalimantan (Adelaar, 2004), beberapa peneliti terkemuka sepakat bahwa budaya Melayu berasal dan terbentuk di pantai timur Sumatra, Semenanjung Malaya, dan rangkaian kepulauan diantaranya (Raffles, 1835; Reid, 2001; Milner, 2009). Sehingga tidak mengherankan jika saat ini Riau diyakini sebagai pusat budaya Melayu untuk konteks Indonesia (Long, 2013).

Seiring dengan era reformasi, penguatan identitas lokal dan budaya Melayu menjadi topik penting dalam kaitannya dengan program desentralisasi (Reid, 2001; Long, 2013). Hal ini tercermin dengan melegalisasi budaya Melayu sebagai referensi budaya utama di Riau sejak tahun 2000 (Pemprov\_Riau, 2000), dan Kota Pekanbaru dimulai sejak tahun 2001 (Pemko\_Pekanbaru, 2001) melalui Visi dan Misi pembangunan kota.

Pada prakteknya, desentralisasi saat ini telah menjelma sebagai salah satu program radikal (Long, 2013). Hal ini terbukti dengan menempatkan budaya Melayu sebagai referensinya utama dalam kehidupan bersosial budaya di Riau, meskipun orang Melayu bukanlah etnis mayoritas. Seperti halnya di Kota Pekanbaru, orang Melayu hanya berjumlah 20% dari lebih

kurang satu juta populasi kota (BPS, 2012), namun budaya Melayu telah ditempatkan sebagai sumber untuk merekonstruksi tidak hanya kehidupan masyarakatnya, tetapi juga identitas kota.

Kondisi ini telah memicu permasalahan baru yang dikenal sebagai *post-revolutionary nationalism* (Reid, 2001); periode yang menempatkan klaim etnis tertentu untuk menerapkan pola dan referensi kebudayaan tertentu (Melayu) pada kepentingan individu dan keragaman kebudayaan yang ada. Lebih jauh lagi, radikalisme juga terjadi dalam internalisasi etnis Melayu itu sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya upaya mendefinisikan ulang identitas Melayu kedalam definisi sempit (Milner, 2009); disebut orang Melayu jika mampu dalam tiga hal yaitu berbahasa Melayu, muslim, dan beradat Melayu. Oleh karenanya, topik penelitian terkait identitas ini menjadi menarik untuk dilakukan di Kota Pekanbaru yang dikenal dengan kehidupan multietnisnya.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil kajian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat menelusuri kondisi dan sumber permasalahan sosial (Patton, 1990) dengan menitikberatkan pada pemahaman arti dan proses berdasarkan berbagai material empiris (Groat and Wang, 2002). Pendekatan kualitatif juga memungkinkan untuk mengombinasikan berbagai metode operasional penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisa data, baik itu bersumber pada orang, artefak, even, atau pun interpretasi (Groat and Wang, 2002; Creswell, 2003). Dalam penelitian ini, data utama dikumpulkan dari studi lapangan dan dikelompokkan dalam tiga bentuk data: bukti fisik, interpretasi responden, dan dokumen tertulis. Data utama ini dikumpulkan dengan berbagai metode operasional seperti observasi, wawancara semi-terstruktur, PEI, arsip, catatan lapangan, diskusi kelompok, dan dokumentasi lapangan.

Dari pengalaman studi lapangan, metode operasional wawancara memberikan manfaat lebih untuk memaksimalkan pengumpulan data dan informasi. Dalam hal ini, faktor kedekatan emosional dan kesamaan latar budaya terbukti dapat menjembatani kebuntuan dan kekakuan; terutama berkaitan dengan topik bahasan sensitif (Whyte and Whyte, 1984; Richards, 2009).

Secara umum, kajian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dapat menempatkan peneliti untuk berperan aktif dalam situasi yang sedang diteliti (Richards, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Transformasi Arsitektur Perkotaan

Arsitektur dalam konteks perkotaan tidak dapat membingkai suatu identitas secara pasti. Melainkan, arsitektur membutuhkan translasi ke bentuk yang dapat diamati atau bentuk lain. Dalam pengertian dan kaitan dengan penelitian ini, hubungan antara budaya dan arsitektur dapat diidentifikasi melalui fungsi simbol, rancang bangun, dan hubungan keterkaitan antara perubahan sosial budaya dalam kehidupan keseharian. Dengan demikian, arsitektur perkotaan dapat diposisikan perannya dalam konteks membentuk identitas kota melalui simbol kapital dan simbol dominasi (Bourdieu, 1986), dan pada akhirnya arsitektur perkotaan tersebut dapat menjadi produk dari cerminan masa depan dan perubahan sosial (Findley, 2005; Dovey, 2010). Hal ini sesuai dengan pandangan Hutcheon (1999) yang menyatakan bahwa kepercayaan dan nilai kebudayaan akan memberikan kekuatan dalam membentuk fisik dan pergerakan sosial. Sehingga dalam tulisan ini, transformasi arsitektur perkotaan akan ditinjau dari dua hal: representasi fisik arsitektural perkotaan, dan perubahan kehidupan sosial perkotaan.

Dengan meletakkan budaya Melayu sebagai referensi utama di Kota Pekanbaru, representasi fisik arsitektural perkotaan juga mengalami perubahan. Hal ini tercermin dari perubahan dan penyesuaian wajah arsitektur kota. Sebagai bagian dari budaya, arsitektur Melayu mulai diimplementasikan pada ekspresi visual bangunan kota sejak tahun 2000 hingga saat ini. Secara umum, fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian upaya untuk mencari simbol dominan melalui perubahan tampilan arsitektural bangunan. Dalam perkembangannya, implementasi arsitektur Melayu ini juga mulai mengalami berbagai permasalahan tersendiri.

*"Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera*

*yang Berlandaskan Iman dan Taqwa"*  
(Visi Kota Pekanbaru).

Demikian pula dengan kehidupan masyarakat di Kota Pekanbaru yang mencoba menyelaraskan dengan nilai-nilai budaya Melayu, baik dalam kehidupan pribadi atau pun di publik. Dalam konteks ini, masyarakat perkotaan juga melakukan penyesuaian dengan perubahan arsitektur kota Pekanbaru. Namun demikian, kehidupan multietnis kota para praktiknya telah memberikan perubahan dua arah dalam implementasi nilai-nilai budaya Melayu tersebut (Gambar 1).



**Gambar 1.** Anjungan Rumah Tradisional Melayu di TMII Jakarta

### 2. Representasi Arsitektur Melayu

Visi Kota Pekanbaru menuju pusat kebudayaan Melayu, dijabarkan dalam lima Misi Pembangunan kota (Pemko Pekanbaru, 2001). Dalam konteks ini, salah satu dari misi ini bersinggungan langsung dengan arsitektur yaitu:

*'...kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu...'* (Misi Kota Pekanbaru).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Pekanbaru secara legal melalui peraturan daerah (perda) mengintruksikan agar mengadopsi arsitektur Melayu-Riau untuk ekspresi bangunan kota (Gambar 2). Hal ini berlaku tidak hanya untuk bangunan pemerintahan saja, tetapi juga bagi sebagian besar bangunan publik dan swasta. Sehingga, dalam kurun waktu antara

2000-2010, semua bangunan pemerintah kota telah melakukan renovasi pada tampilan ekspresi visual dengan menyesuaikan terhadap perda bangunan kota.



**Gambar 2.** Kantor Walikota sebagai Salah Satu Model Arsitektur Melayu di Pekanbaru

Implementasi arsitektur Melayu-Riau pada kenyataannya telah membawa konsekuensi serius tidak hanya pada wajah arsitektur kota, namun bagi arsitektur lokal itu, bagi pemerintah, dan juga bagi para pelaku konstruksi dan arsitek. Fenomena ini dapat ditinjau dan dikaji dari berbagai sudut pandang seperti mendefinisikan arsitektur Melayu tradisional, arsitektur Melayu kontemporer. Pada akhirnya, transformasi ekspresi wajah arsitektur di Kota Pekanbaru bertujuan mencari identitas yang dapat diterima sebagai identitas arsitektur kolektif yang sesuai dengan budaya Melayu dan menunjang perkembangan arsitektur.

*'... arsitektur tradisional Melayu telah menjadi referensi utama untuk mengekspresikan nilai Melayu pada bangunan perkotaan ...'* (Walikota, Responden 37).

### 3. Kehidupan Sosial Budaya Multietnis

Untuk mewujudkan kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu, hal ini membawa dampak nyata dalam perubahan kehidupan keseharian masyarakat kota. Meskipun multietnis, masyarakat kota terus mencoba untuk menerapkan nilai budaya dan tradisi Melayu untuk menjadi bagian identitas. Meskipun tidak dapat berlaku secara sukarela dan sadar, pemerintah terus melakukan upaya legalisasi melalui perda untuk menerapkan dan mengimplementasi budaya Melayu bagi masyarakat seperti melalui perayaan komunal kota, pakaian seragam sekolah dan kantor, perayaan budaya, dan tunjuk ajar.

Dalam konteks kehidupan multietnis perkotaan, implementasi nilai budaya Melayu tidak dapat diterapkan secara penuh dan tegas. Namun, terus berlangsung negosiasi sosial ditengah masyarakat. Hal ini tercermin dengan bentuk kesepakatan yaitu nilai budaya dan tradisi Melayu akan diterima sebagai referensi utama kehidupan bermasyarakat, namun pemerintah kota tetap memberikan ruang gerak keleluasaan untuk tumbuh kembang bagi ekspresi dan tradisi budaya-budaya lainnya. Dengan demikian, tidak hanya toleransi kehidupan keseharian saja yang tercapai, tetapi juga kerja sama antar perkumpulan sosial budaya di perkotaan (Gambar 3).

*'...setiap orang disini [Pekanbaru] harus mengimplementasikan nilai budaya Melayu, namun dalam waktu yang bersamaan juga bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka masing-masing ...'* (Responden 19).



**Gambar 3.** Tradisi Petang Megang Telah Menjadi Perayaan Tahunan Kota

## KESIMPULAN

Fenomena transformasi identitas di Kota Pekanbaru, tidak hanya terkait dengan perubahan ekspresi wajah kota pada bangunan fisik semata. Namun, perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat perkotaan juga memberikan peranan besar. Terlepas dari konsekuensi yang timbul, upaya transformasi arsitektur perkotaan ini akan menuju suatu kesepakatan baru yaitu kolektif identitas yang sesuai dengan budaya Melayu dalam konteks multietnis kekinian. Sehingga upaya transformasi identitas ini dapat diterima secara luas. Hal ini sesuai dengan pandang Hall (1989) yang menyatakan bahwa *'it is necessary to find*

*a new identity which has not lost hold of the place and the ground from which we can speak, yet it is no longer contained within that place as an essence'.*

### Daftar Pustaka

- Adelaar, A. (2004) 'Where Does Malay Come From? Twenty Years of Discussions about Homeland, Migrations and Classifications', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI)*, 160(1), pp. 1-30.
- Ballantyne, A. (2007) *Deleuze and Guattari for Architects*. Abingdon: Routledge.
- Bourdieu, P. (1986) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. [New edn. London: Routledge.
- BPS. (2012) *Pekanbaru in Figure 2012*. [Online]. Available at: <http://pekanbarukota.bps.go.id/index.php/kependudukan> (Accessed: 9 January 2013).
- Creswell, J.W. (2003) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. 2nd edn. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
- De Landa, M. (2006) *New Philosophy of Society Assemblage Theory and Social Complexity*. London: Continuum International Publishing Group.
- Deleuze, G. and Guattari, F. (2004) *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. London: Continuum.
- Dovey, K. (2008) *Framing places: Mediating Power in Built Form*. 2nd edn. London: Routledge.
- \_\_\_\_\_ (2010) *Becoming Places Urbanism/Architecture/Identity/Power*. Hoboken: Taylor & Francis.
- Findley, L. (2005) *Building Change: Architecture, Politics and Cultural Agency*. London: Routledge.
- Groat, L.N. and Wang, D. (2002) *Architectural Research Methods*. New York: J. Wiley.
- Hall, S. (1989) 'Ethnicity: Identity and Difference', *Radical America*, 23(4), pp. 9-20.
- Heidegger, M. (1968) *Existence and Being*. [3d edn. London: Vision.
- Hutcheon, P. (1999) *Building Character and Culture*. Westport: Greenwood Publishing Group.
- Jive, G. and Larkham, P.J. (2003) 'Sense of Place, Authenticity and Character: A Commentary', *Journal of Urban Design*, 8(1), pp. 67-81.
- Long, N.J. (2013) *Being Malay in Indonesia*. Copenhagen: NIAS Press.
- Massey, D. (1994) *Space, Place, and Gender*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Milner, A. (2009) *The Malays*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Norberg-Schulz, C. (1980) *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture*. New York: Rizzoli.
- Patton, M.Q. (1990) *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Sage Publications.
- Pemko\_Pekanbaru (2001) 'Visi Kota Pekanbaru', [Online]. Available at: <http://pekanbaru.go.id/visi-kota/> (Accessed: 08 March 2012; 12.30AM).
- Pemprov\_Riau (2000) 'Vision and Mission', [Online]. Available at: <http://www.riau.go.id/index.php?/eng/Visimisi> (Accessed: 12 March 2013).
- Raffles, S. (1835) *Malay Annals*. 2012 edn. Memphis, USA: General Book LLC.
- Reid, A. (2001) 'Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities', *Journal of Southeast Asian Studies*, 32(3), pp. 295-313.

Richards, L. (2009) *Handling Qualitative Data: A Practical Guide*. 2nd edn. London: SAGE.

Whyte, W.F. and Whyte, K.K. (1984) *Learning from the Field: A Guide from Experience*. Beverly Hills: Sage Publications.